

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan dari keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang, dalam hubungan keagenan *principal* melibatkan *agent* untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak yang disebut agen diwakili oleh bawahan, dan *principal* diwakili oleh atasan. Dalam hubungan keagenan antara *agent* dan *principal*, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara agen dan *principal* disebut dengan *agency problem* (Priscilla & Siregar, 2020). Teori keagenan menjelaskan bagaimana *principal* dan agen yang terlibat dalam organisasi sektor publik akan bertindak, karena memiliki kepentingan yang berbeda (Pikukuhing, 2021). Teori keagenan berkaitan dengan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai *principal* definisi asimetri informasi adalah adanya perbedaan informasi oleh manajemen yang bertugas kegiatan operasional kepada manajer (Sarwendhi, 2021).

Teori keagenan pada individu akan berpikir untuk mencapai kepentingan pribadinya, sehingga akan berdampak buruk pada hubungan antara *principal* dan *agent*. Setiap individu dapat bertindak demi kepentingan pribadi mereka yang berdampak pada anggaran. Dalam teori keagenan terdapat 3 asumsi yang

dijelaskan, yaitu memiliki keterbatasan rasional, mementingkan diri sendiri, dan menghindari risiko. Menurut ketiga asumsi yang disampaikan tersebut, manusia akan cenderung untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan organisasinya untuk memperoleh jenjang karir yang lebih baik dimasa depan (Pramessti & Sujana, 2020)

2.2 Pengertian Anggaran

Mardiasmono (2017) mendefinisikan anggaran sebagai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dijelaskan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam sektor publik merupakan hal yang sangat rumit dan mengandung unsur politik, anggaran sektor publik harus diawasi mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. anggaran merupakan sistem perencanaan dan pengendalian sistem pemerintahan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

2.2.1 Fungsi anggaran sektor publik

Menurut Mardiasmono (2017) anggaran sektor publik mempunyai fungsi utama, yaitu :

a. Sebagai Alat Perencanaan

untuk melakukan berbagai perencanaan, seperti perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana dan sumber pembiayaan.

b. Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran

pemerintahan agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Sebagai Alat Kebijakan Fiksial

Untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Sebagai Alat Politik

Untuk memutuskan priorita-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

e. Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

f. Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

g. Sebagai Alat Motivasi

Untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

h. Sebagai Alat Menciptakan Ruang Publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD, Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran politik.

2.2.2 Prinsip-prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran

Menurut Mardiasmono (2017), prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

a. Otoritas oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

b. Komprehensif

Harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan.

c. Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

d. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

e. Periodik

dapat bersifat tahunan dan multi tahunan.

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi dapat dijadikan pemborosan dan terjadi inefisiensi anggaran serta dapat

mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

g. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

h. Diketahui Publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas

2.2.3 Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD selanjutnya Rancangan APBD (RAPBD) akan dibahas oleh pemerintahan daerah dengan usulan dari DPRD. Jika RAPBD telah disetujui oleh DPRD, maka RAPBD ditetapkan sebagai APBD peraturan daerah (Perda). Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, ketentuan lebih lanjut melalui keputusan Gubernur/Walikota/Bupati. Dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Anggaran sektor publik dan belanja Negara/Daerah yang dipresentasikan setiap tahun oleh pihak eksekutif, memberikan informasi dengan rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai.:

Menurut Mardiasmono (2017) proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyelesaikan barang dan jasa publik melalui proses pemerioritasan,
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
2. Ketersediaan sumber daya.
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
4. Faktor yang mempengaruhi anggaran.

2.2.4 Prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran

Menurut Mardiasmono (2017), siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:

a. Tahap Persiapan Anggaran

Dilakukan taksiran pengeluaran dan taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum penyetujuan taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup bahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap yang melibatkan politik cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Dalam tahap pelaksanaan, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal, untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode selanjutnya.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap pelaporan dilakukan pada akhir periode atau waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan. Tahap evaluasi anggaran hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk proses pada periode berikutnya

2.3 Senjangan Anggaran

Senjangan anggaran merupakan praktik yang dilakukan oleh penyusun anggaran dengan sengaja memasukkan jumlah pengeluaran lebih besar dan

jumlah pendapatan lebih kecil ke dalam anggaran. Altenburger (2021), Karila *et al.* (2020) jika jumlah biaya atau pendapatan di relisasikan dan dibandingkan dengan yang dianggarkan, maka menunjukkan penampilan usaha yang berhasil. Berdasarkan teori keagenan, senjangan anggaran terjadi karena adanya asimetri informasi antara pembuat anggaran dengan publik, sehingga organisasi sektor publik menetapkan anggaran di bawah kemampuannya (Pikukuhing, 2021).

Carolina, (2020), menyatakan terdapat tiga alasan manajer melakukan perilaku senjangan anggaran, yaitu :

1. Senjangan anggaran digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga terjadi pada manajer dapat melampaui anggaran yang dicapai.
2. Masyarakat selalu percaya bahwa hasil pekerjaannya akan terlihat baik di mata atasan jika dapat mencapai anggarannya.
3. Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan. Bahwa atasan melakukan senjangan anggaran untuk pencapaian target anggaran, sehingga dimata atasan terlihat bagus, mengatasi kondisi yang tidak pasti dan rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya.

2.4 Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah perbedaan informasi yang diperoleh antara satu pihak satu dengan pihak lain, dalam kegiatan ekonomi atau dengan kata lain

dimana keadaan dimana satu pihak memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Asimetri informasi dalam organisasi sektor publik merupakan salah satu penyebab lemahnya penerapan *performance based budgeting*, karena setiap orang berlomba-lomba untuk mencapai target kinerjanya dengan berbagai cara, terkadang dengan cara yang tidak etis. Asimetri Informasi secara empiris merupakan kekhawatiran yang berasal dari niat dan keputusan atasan yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan perusahaan (Harakeh *et.al.*, 2020). Tetapi dalam Sektor Pemerintahan informasi yang didapat antar atasan dan bawahan sama tidak adanya perbedaan informasi yang di peroleh tersebut.

2.5 Penekanan Anggaran

Didalam instansi pemerintah penekanan anggaran adalah hal yang penting. Penekanan anggaran merupakan hal yang sensitif bagi Instansi Pemerintah, maka dari itu penyusunan APBD harus mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan APBD tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan melalui keputusan Gubernur/Walikota/Bupati data dapat di alokasikan pada tiap-tiap Perangkat Daerah.

Pratiwi & Puspita (2019) penekanan anggaran dapat mengurangi kecenderungan untuk membangun senjangan anggaran, dimana dapat memberikan efek negatif untuk mencapai target anggaran dengan jumlah yang lebih besar, hal tersebut menunjukkan bahwa manajer tingkat atas dapat melakukan negosiasi terhadap senjangan anggaran. Penekanan anggaran dianggap sebagai salah satu

faktor yang memicu timbulnya terjadi senjangan anggaran. Hal tersebut bisa terjadi apabila penelinaian kinerja bawahan ditentukan oleh anggaran yang telah disusun, maka bawahan akan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan cara membuat anggaran yang mudah untuk dicapai.

2.6 Partisipasi Anggaran

Pihak yang berperan dalam partisipasi anggaran adalah DPR, Kabinet, dan Departemen-departemen di tingkat Negara. Pihak yang terlibat dalam proses anggaran melibatkan pihak eksekutif yang bertanggung jawab untuk merancang anggaran, eksekutif juga harus membuat anggaran jangka menengah, mengatur seluruh sumber daya keuangan negara dan memonitor setiap departemen-departemen dalam membelanjakan uang negara. Selanjutnya pihak legislatif pada sektor publik harus mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran mampu mengatasi berbagai permasalahan anggaran, misalnya masyarakat dapat memberikan informasi, menyampaikan saran dan pendapatnya secara bertanggungjawab langsung kepada DPR atau melalui lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Pada dasarnya anggaran dan penganggaran adalah salah satu kegiatan yang berbeda, dimana anggaran ini adalah salah satu alat dalam pelaksanaan sedangkan anggaran merupakan kegiatan untuk menyusun anggaran itu sendiri. Menurut Jalaluddin, *et.al.* (2020) partisipasi anggaran dapat diartikan sebagai proses yang mendeskripsikan perilaku individu-individu yang terlibat dalam penyusunan

anggaran dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di masa depan. Sedangkan menurut Pramudiati *et al.* (2022) partisipasi anggaran dibuat dengan mengikuti biaya pengeluaran atau pendapatan yang dialokasikan dari kesepakatan bersama untuk mewujudkan ekonomi, efisien, dan anggaran yang cukup dengan mudah dicapai.



2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Penelitian asimetri informasi dan penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Alat Analisis	Indikator	Hasil
1	<i>Managing Inefficiency Of Participatory Budgeting By Investigating The Dark Side Personality Of Managers.</i> (Suryadi B, Mulyaningsih H.D, Rajiani I, 2019)	Variabel Independen : X1 = Kepribadian X2 = Partisipasi Anggaran Variabel Dependen : Y = Kesenjangan Anggaran	Kuantitatif	Indikator Partisipasi anggaran : 1. keterlibatan atasan. 2. permintaan pendapat menyusun anggaran. 3. keikutsertaan penyusunan anggaran. Indikator Senjangan Anggaran : 1. Standar anggaran dapat mendorong produktivitas. 2. Pencapaian Anggaran. 3. Tuntutan untuk mencapai target yang disesuaikan. 4. tuntutan pada anggaran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran
2	<i>Ethical Optimism, Participative Budgeting, and Managerial Performance in</i>	Variabel Independen : X1 = Partisipasi anggaran	Kuantitatif	-	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif

	<p><i>Regional Government Work Unit in Indonesia: A Contingency Theory Approach</i></p> <p>(Suleman H. A. K, Muhammad Iqbal, Abdullah W. J, Ahmad Purbaya, 2019)</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>Y1 = Senjangan Anggaran</p> <p>Y1 = Kinerja Manajerial</p> <p>Variabel Moderator :</p> <p>M1 = Optimisme etis</p> <p>M2 = Penekanan Anggaran</p>			terhadap senjangan anggaran
3	<p>Pengaruh Tujuan Penggunaan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Partisipasi Anggaran dan Penekanan Anggaran Sebagai Variabel Mediasi</p> <p>(Yeyen Pratiwi, 2019)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Penggunaan Anggaran</p> <p>X2 = Tujuan Penggunaan Anggaran</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>Y = Senjangan anggaran</p> <p>Variabel Mediasi :</p> <p>M1 = Partisipasi Anggaran</p> <p>M2 = Penekanan Anggaran</p>	Kuantitatif	<p>Indikator partisipasi anggaran :</p> <p>Terlibatan dalam proses anggaran.</p> <p>Revisi anggaran.</p> <p>Pentingnya kontribusi atasan</p> <p>Mendiskusikan dengan atasan.</p> <p>Adanya permintaan pendapat.</p> <p>Indikator Penekanan anggaran :</p> <p>Sebagai fungsi pengendalian.</p> <p>Sebagai pengukur pekerjaan</p> <p>Untuk mencapai target anggaran.</p> <p>Penghargaan ketika mencapai target anggaran.</p> <p>Meningkatkan kinerja.</p> <p>Indikator Senjangan anggaran :</p> <p>Anggaran standar.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran terhadap senjangan anggaran juga dimediasi secara positif oleh partisipasi anggaran dan penekanan anggaran.</p>

				Perilaku anggaran Anggaran ketat. Tekanan anggaran. Efisiensi anggaran. Target anggaran.	
4	<i>The Effect Of Budget Participation, Asimetry Information And Budget Emphasis On Budgetary Slack With Locus Of Control As Moderating Variabel At Islamic University Of Sumatera Utara (UISU)</i> (Muhammad Joni Barus, Erlina, 2019)	Variabel Independen : X1 = Partisipasi anggaran X2 = Penekanan anggaran X3 = Asimetri informasi X4 = <i>Locus of Control</i> Variabel Dependen: Y = Senjangan anggaran Variabel Moderasi : Z = <i>Locus Of Control</i>	Kuantitatif		Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi dan penekanan anggaran tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran.
5	<i>Participative Budget, Information Asymmetry, and Budget Emphasis as a Predictor of Budgetary Slack</i> (Sulastri dan Maya Tri Wardani 2021)	Variabel Independen : X1 = Partisipasi Anggaran X2 = Asimetri Informasi X3 = Penekanan Anggaran Variabel Dependen : Y = Senjangan anggaran	Kuantitatif	Indikator Penekanan anggaran : Sebagai fungsi pengendalian. Sebagai pengukur pekerjaan Untuk mencapai target anggaran. Penghargaan ketika mencapai target anggaran. Meningkatkan kinerja. Indikator Partisipasi anggaran : Partisipasi dalam rencana akhir	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran partisipasi, asimetri informasi, dan penekanan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran.

				<p>Frekuensi aspirasi tujuan.</p> <p>Dampak anggaran akhir.</p> <p>Pentingnya kontribusi</p> <p>Frekuensi menjelaskan ide.</p> <p>Indikator Senjangan anggaran :</p> <p>Anggaran standar.</p> <p>Perilaku anggaran</p> <p>Anggaran ketat.</p> <p>Tekanan anggaran.</p> <p>Efisiensi anggaran.</p> <p>Target anggaran.</p>	
6	<p>Pengaruh Penganggaran Partisipatif Dan Asimetri Informasi Terhadap Budgetary Slack Dengan Moral Equity Sebagai Variabel Moderasi</p> <p>(Salman Hafidz Iriansyah, Harry Suharman, Rahman Soenaria 2021)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Partisipasi Anggaran</p> <p>X2 = Asimetri Informasi</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y = Senjangan anggaran</p> <p>Variabel Moderasi :</p> <p>Z = Moral equity</p>	Kuantitatif	-	<p>Hasil menunjukkan bahwa Asimetri informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap senjangan anggaran</p>
7	<p><i>Participative Budgeting, Employee Motivation and Budgetary Slack in Private Sector in Indonesia</i></p> <p>(Yenni Carolina 2020)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Partisipasi Anggaran.</p> <p>X2 = Motivasi Karyawan.</p> <p>Variabel Dependen :</p>	Kuantitatif	<p>Indikator Partisipasi Anggaran :</p> <p>Terlibat dalam proses anggaran.</p> <p>Revisi anggaran.</p> <p>Memberikan pendapat tentang anggaran.</p> <p>Dapat anggaran.</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap senjangan anggaran.</p>

		Y = Senjangan Anggaran		Pentingnya kontribusi atasan. Indikator Kelonggaran Anggaran : Pencapaian anggaran. Target anggaran Target efisiensi.	
8	<i>A study of performance model development and good governance budgeting</i> (Haliah, 2021)	Variabel Independen : X1 = Asimetri Informasi X2 = Politik X3 = Budaya dan Peraturan Variabel Dependen : Y1 = Senjangan Anggaran Y2 = Kinerja Variabel Moderasi : Z = Partisipasi Anggaran	Kuantitatif		Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran berpengaruh signifikan. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi anggaran mampu memoderasi variabel senjangan anggaran.
9	<i>Determinants Budgetary Slack</i> (Ningrum Pramudiati, Anandita Zulia Putri, Betti Prastiwi, 2022)	Variabel Independen : X1 = Partisipasi Anggaran X2 = Asimetri Informasi X3 = Penekanan Anggaran X4 = Komitmen Organisasi Variabel Dependen : Y = Senjangan Anggaran	Kuantitatif		Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan. Hasil penelitian asimetri informasi, penekanan anggaran, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

10	<p><i>The Relationship of Budget Emphasis on the Tendency to Create Budgetary Slack</i></p> <p>(Sulastri and Maya Tri Wardani, 2020)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Penekanan Anggaran.</p> <p>Variabel = Senjangan Anggaran.</p>	Kuantitatif		<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penekanan anggaran berpengaruh positif terhadap timbulnya senjangan anggaran.</p>
11	<p><i>Effect of Budgeting Participation, Information Asymmetry, and Self Esteem on Budgetary Slack with Organizational Commitment as Moderated Variable</i></p> <p>(Putu Ayu Pramesti dan I Ketut Sujana, 2020)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Partisipasi Anggaran</p> <p>X2 = Asimetri Informasi</p> <p>X3 = Self Esteem</p> <p>Variabel Moderasi :</p> <p>M = Komitmen Organisasi</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y = Senjangan Anggaran</p>	Kuantitatif		<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri Informasi berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran</p>
12	<p><i>Involving Information Asymmetry And SelfEsteem In The Slack Budget</i></p> <p>(Mappa Panglima Banding, Febria Ramadhana, Roni Padliansyah, 2021)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Asimetri Informasi.</p> <p>X2 = Harga Diri.</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y = Senjangan Anggaran.</p>	Kuantitatif		<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asimetri Informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran.</p>
13	<p><i>Budget participation, information asymmetry, and job insecurity as a predictor of budgetary slack</i></p> <p>(Hayu Pikukuhing Tyas, Nurkholis, Endang Mardiaty, 2021)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Partisipasi Anggaran.</p> <p>X2 = Asimetri Informasi.</p> <p>X3 = Job Insecurity</p> <p>Variabel dependen :</p>	Kuantitatif	<p>Indikator Senjangan Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar yang ditetapkan. 2. Pencapaian anggaran. 3. Tuntutan tanggung jawab anggaran. 4. Target anggaran. 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan asimetri informasi. berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran.</p>

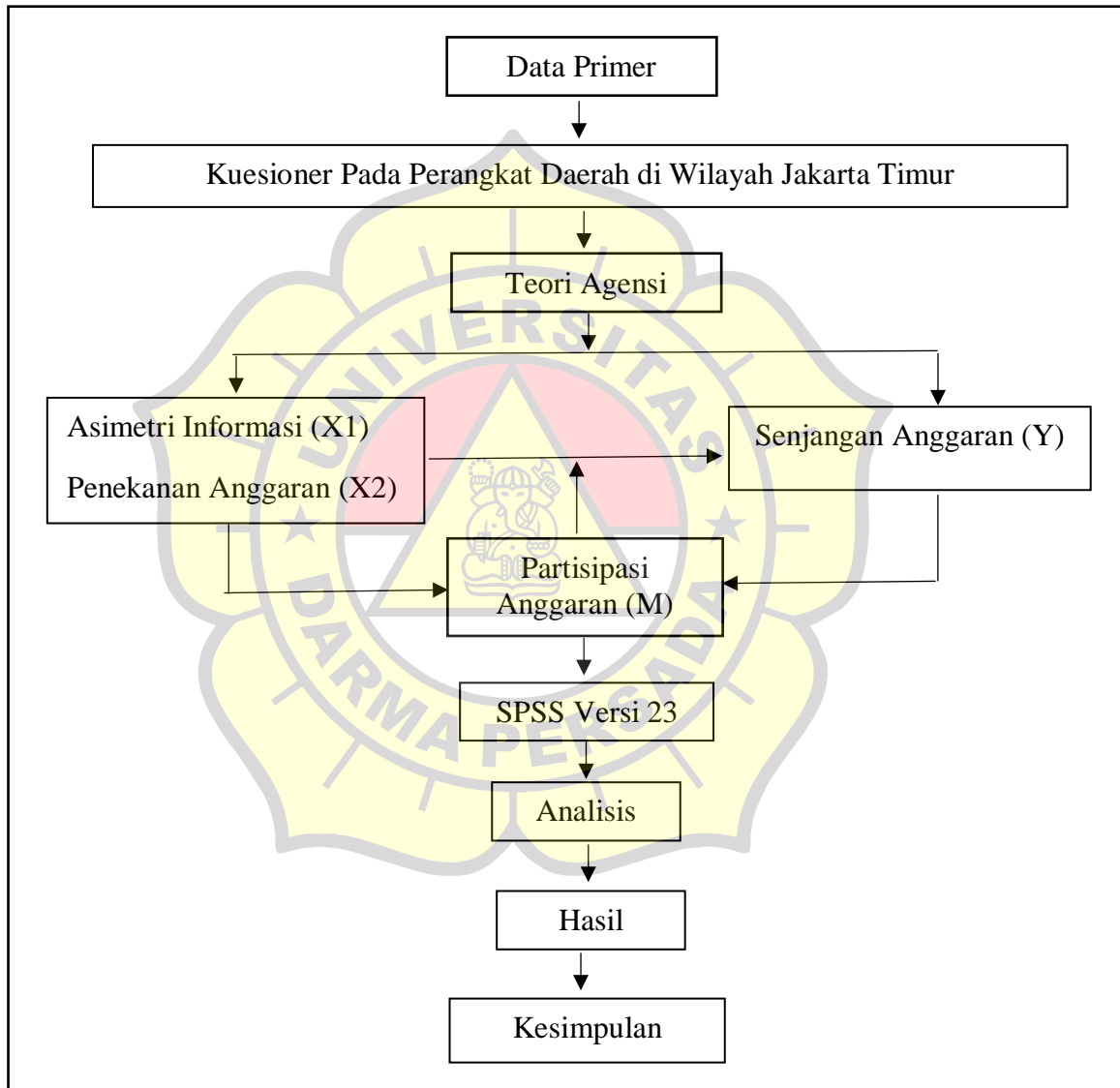
		Y = Senjangan Anggaran.		<p>5. Pencapaian target anggaran.</p> <p>Indikator Partisipasi Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi dalam penyusunan anggaran 2. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir 3. Berikan pendapat 4. Frekuensi untuk membuat saran 5. Kepuasan dalam revisi penyusunan anggaran. <p>Indikator Asimetri Informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas operasi perusahaan 2. Masukan-keluar 3. Potensi kinerja 4. Teknik kerja 5. Dampak faktor eksternal 	
14	<p><i>Information Asymmetry Group Cohesiveness, and Budgetary Slack: A Moderating Effect Of Budgetary Participation</i></p> <p>(Jalaluddin, Juanda, Lia utami, 2020)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Asimetri Informasi.</p> <p>X2 = Partisipasi Anggaran</p> <p>X3 = Kohesivitas Kelompok.</p> <p>Variabel dependen :</p> <p>X1 = Senjangan Anggaran.</p> <p>Variabel Moderasi :</p>	Kuantitatif		<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran mampu memoderasi asimetri informasi terhadap senjangan anggaran.</p>

		M = Partisipasi Anggaran.			
15	<i>Influence of budgetary slack and elements of the budgetary process on perceptions of justice</i> (Vanderlei dos Santos, Ilse Maria Beuren, Suzimara Skrepitz, 2022)	Variabel Independen : X1 = Partisipasi Anggaran X2 = tujuan anggaran X3 = keadilan distributif X4 = keadilan prosedural Variabel Dependen : Y = Senjangan Anggaran	Kuantitatif	Indikator Partisipasi Anggaran : 1. Partisipasi dalam penyusunan anggaran 2. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir 3. Berikan pendapat 4. Frekuensi untuk membuat saran 5. Kepuasan dalam revisi penyusunan anggaran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran.
16	<i>Budgetary Participation's Antecedent of Information Asymmetry and its Outcomes</i> (QUANG-HUY NGO, 2019)	Variabel Independen : X1 = Partisipasi Anggaran X2 = Asimetri Informasi X3 = Sikap Manajer Variabel Dependen : Y = Senjangan Anggaran	Kuantitatif		Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran .
17	<i>The Effect of Participatory Budgeting, Information Asymmetry, and Organizational Commitment on Budgetary Slack</i> (Rezza Arlinda Sarwendhi, 2021)	Variabel Independen : X1 : Asimetri Informasi. X2 : Partisipasi Anggaran. X3 : Komitmen Organisasi Variabel Dependen ; Y : Senjangan Anggaran.	Kuantitatif		Hasil uji penelitian menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi asimetri berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

Sumber : Data diolah (2022)

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara logika berjalannya sebuah penelitian, digunakan untuk mempermudah memahami beberapa variabel. Berikut kerangka pemikiran yang dibuat untuk penelitian ini.

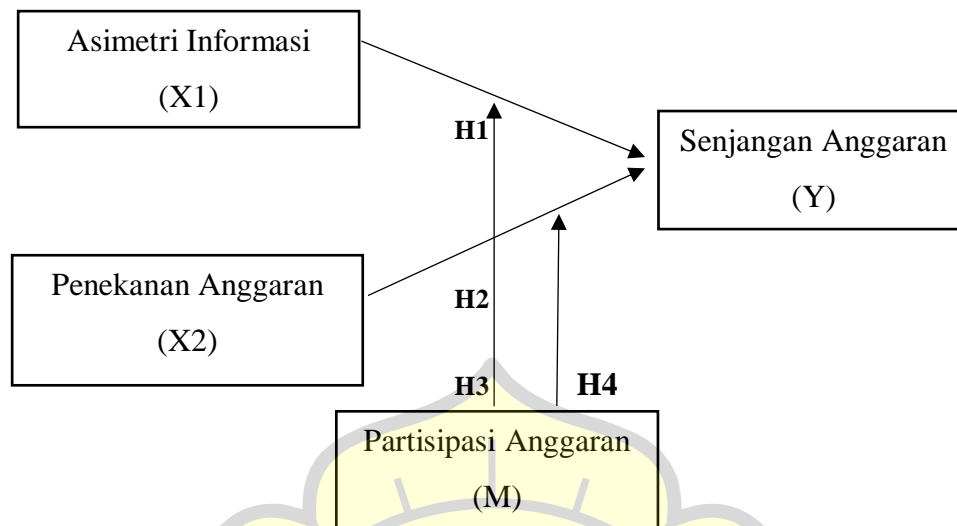


Sumber : Data diolah (2022)

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.9 Kerangka Hipotesis Antar Variabel



Sumber : Data diolah (2022)

Gambar 2. 2
Paradigma Hipotesis

Dari gambar 2.2 menunjukkan paradigma hipotesis, yaitu :

1. Hubungan Asimetri Informasi (X1) dengan Senjangan Anggaran (Y).
2. Hubungan Penekanan Anggaran (X2) dengan Senjangan Anggaran (Y).
3. Hubungan Asimetri Informasi yang dimoderasi oleh Partisipasi Anggaran (M) dengan Senjangan Anggaran.
4. Hubungan Penekanan Anggaran yang dimoderasi oleh Partisipasi Anggaran (M) dengan Senjangan Anggaran.

2.10 Hipotesis Penelitian

Menurut sugiyono (2020) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi anggaran memoderasi peranan asimetri informasi dan penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran.

2.10.1 Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran.

Asimetri informasi merupakan perbedaan atas informasi yang didapat antara satu pihak dengan pihak lain. Asimetri informasi dalam organisasi sektor publik merupakan salah satu penyebab lemahnya pada penerapan *performance based budgeting*, karena setiap orang berlomba-lomba untuk mencapai target kinerjanya dengan berbagai cara, terkadang dengan cara yang tidak etis, maka dibutuhkan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan agar tidak terjadinya informasi yang berbeda.

Sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran seperti penelitian yang dilakukan oleh Pikukuhing. (2021) asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, hal ini dikarenakan bahwa semakin banyak individu yang berpartisipasi dalam anggaran maka intensitas munculnya senjangan anggaran jika akan lebih tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri & Tri Wardani (2020), Haliah, (2021), Pramesti & Sujana. (2020), Banding *et al.* (2021), Sarwendhi. (2021), Carolina. (2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianssyah, S.H., (2021) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran, hal ini dikarenakan bahwa adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak atasan sebagai pemegang informasi yang sebenarnya dengan bawahan yang menerima hasil dari

atasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Barus. (2019). Berbeda dengan penelitian yang Pramudiati *et al.* (2022) menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa bawahan harus mengikuti peraturan tentang anggaran dan penyampaian informasi. bawahan yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan selalu berikan informasi yang diberikan oleh atasan dengan mengikuti situasi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : Asimetri Informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

2.10.2 Penekanan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran.

Penekanan anggaran dapat mengurangi kecenderungan untuk pada senjangan anggaran, dimana akan memberikan efek negatif kepada atasan untuk mencapai target anggaran dengan jumlah yang lebih besar (Sulastri & Tri Wardani, 2020). Meskipun secara teoritis penekanan anggaran memiliki hubungan positif dan negatif terhadap senjangan anggaran, namun dalam kenyataannya hubungan keduanya adalah negatif. Dengan adanya penekanan anggaran memberikan hubungan yang negatif dengan senjangan anggaran.

Sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pengaruh penekanan terhadap senjangan anggaran seperti penelitian yang dilakukan oleh Maya, S, (2021) menyatakan bahwa penekanan anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. hasil yang berbeda juga terdapat pada penelitian. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudiati *et al.* (2022) bahwa penekanan anggaran tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran oleh manajer.

Hal ini dikarenakan bahwa anggaran tidak digunakan sebagai petunjuk alat penilaian dalam organisasi sektor publik agar penyusunan anggaran tidak merasa tertekan dalam mencapai target anggaran yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulastri & Tri Wardani. (2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan, Kahar *et al.* (2019), Ngo, HQ. *et.al* (2019), Barus. (2019) yang menyatakan bahwa penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. hal ini dikarenakan bahwa penekanan anggaran tidak ada kaitannya dengan senjangan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Penekanan Anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

2.10.3 Partisipasi anggaran memoderasi asimetri informasi terhadap senjangan anggaran.

Secara teoritis penekanan anggaran memiliki hubungan positif dan negatif terhadap senjangan anggaran, namun dalam kenyataannya hubungan keduanya adalah negatif. karena adanya penekanan anggaran yang memberikan hubungan negatif dengan senjangan anggaran, tentu saja hubungan antara tujuan penggunaan anggaran juga akan menjadi negatif dengan senjangan anggaran. Teori keagenan berkaitan dengan adanya asimetri informasi antara bawahan sebagai agen dan atasan sebagai prinsipal definisi asimetri informasi adalah adanya ketidakseimbangan informasi yang disediakan oleh organisasi yang bertugas untuk melakukan kegiatan operasional kepada manajer (Sarwendhi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin, *et.al*, (2020), Haliha, (2021) menyatakan bahwa partisipasi anggaran mampu memoderasi asimetri informasi terhadap senjangan anggaran. Hal ini dikarenakan bahwa senjangan anggaran dapat memperkuat atau menekankan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan anggaran pada semua yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran yang tercermin dalam organisasi untuk meminimalkan senjangan anggaran. Berbeda dengan penelitian oleh Pikukuhing. (2021) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Hal ini dikarenakan bahwa adanya asimetri informasi yang terjadi dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk menciptakan senjangan anggaran, dengan asumsi bahwa atasan tidak mengetahui tindakan yang diambil oleh bawahan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pramudiati *et al.*, (2022), Pramesti & Sujana. (2020), Iriansyah, S.H (2021), Dos Santos *et al.* (2022), Suryadi *et al.* (2019), Kahar *et al.* (2019), Ngo, Q.H (2019). Berbeda dengan penelitian oleh Kahar *et al.* (2019), Barus. (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. Hal ini dikarenakan bahwa keikutsertaan partisipasi atasan terhadap penyusunan anggaran akan mempengaruhi tingkat senjangan anggaran. berbeda pula dengan penelitian oleh Sarwendhi. (2021) menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hal ini bahwa tingkat partisipasi dalam penganggaran dalam suatu organisasi bukanlah jaminan untuk meningkatkan kinerja manajerial, karena kontrol yang baik dari perusahaan internal sehingga tingkat partisipasi seorang manajer dalam penganggaran tidak akan mempengaruhi kelonggaran anggaran

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Partisipasi anggaran mampu memoderasi hubungan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran.

2.10.4 Partisipasi anggaran memoderasi penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran.

Partisipasi anggaran dapat diartikan sebagai proses yang mendeskripsikan perilaku individu-individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk masa depan. (Jalaluddin, *et.al* ., 2020). Partisipasi anggaran dalam keagenan memiliki masalah disfungsional bagi organisasi, hal ini didasarkan pada konsep teori keagenan yang menyatakan bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi dan tujuan yang berbeda. Selain itu setiap tindakan atas kepentingannya sendiri atau pelaksana memiliki sifat untuk menghindari risiko yang akan terjadi sehingga manajemen akan memilih untuk bekerja seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal. Penekanan anggaran dapat mengurangi kecenderungan untuk membangun senjangan anggaran dimana akan memberikan efek negatif kepada atasan untuk mencapai target anggaran dengan jumlah yang lebih besar (Sulastri & Tri Wardani, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin, *et.al*, (2020), Haliha, (2021) menyatakan bahwa partisipasi anggaran mampu memoderasi asimetri informasi terhadap senjangan anggaran. Hal ini dikarenakan bahwa senjangan anggaran dapat memperkuat atau menekankan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan anggaran pada semua yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran

yang tercermin dalam organisasi untuk meminimalkan senjangan anggaran. Berbeda dengan penelitian oleh Pikukuhing. (2021) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Hal ini dikarenakan bahwa adanya asimetri informasi yang terjadi dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk menciptakan senjangan anggaran, dengan asumsi bahwa atasan tidak mengetahui tindakan yang diambil oleh bawahan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pramudiati *et al.* (2022), Pramesti & Sujana. (2020), Pikukuhing, (2021), Iriansyah, S.H (2021), Dos Santos *et al.* (2022), Suryadi *et al.* (2019), Kahar *et al.* (2019), Ngo, Q.H (2019). Berbeda dengan penelitian oleh Kahar *et al.* (2019), Barus, (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. Hal ini dikarenakan bahwa keikutsertaan partisipasi atasan terhadap penyusunan anggaran akan mempengaruhi tingkat senjangan anggaran. Berbeda pula dengan penelitian oleh Sarwendhi, (2021) menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hal ini bahwa tingkat partisipasi dalam penganggaran dalam suatu organisasi bukanlah jaminan untuk meningkatkan kinerja manajerial, karena kontrol yang baik dari perusahaan internal sehingga tingkat partisipasi seorang manajer dalam penganggaran tidak akan mempengaruhi kelonggaran anggaran

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Partisipasi anggaran mampu memoderasi hubungan penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran